

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit P.T. Alumnii, Bandung, hlm.2.
- Adami Chazawi. 2016. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), hlm. 69
- Ahmad Fahd Budi Suryanto. 2021. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia". Jurnal Dharmasisya. Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021. Jakarta: Universitas Indonesia
- Andi Hamzah, "KUHP dan KUHP", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 306.
- Anggota IKAPI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 61.
- Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.
- Darwin Print, "Hukum Acara Pidana dan Praktek", (Jakarta: Djembatan, 1998), hlm. 8.
- Didik Purwo Endroleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 113
- Direktori Putusan Mahamah Agung Republik Indonesia
- Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Pebruari 2014.
- Edita Elda. 2019. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". Jurnal Lex Lata Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 1, No. 2. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Eva Achjani, Anugerah Rizki, dan Zakky Ikhsan, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan, Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.
- Fadli M Iskandar. 2020. "Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia". Jurnal Khazanah Multidisiplin. Vol. 3, No. 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hartono, "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.116.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, UMM Press, Malang, 2007, hlm.57.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 184

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 27

Kristian dan Yopi Gunawan, "Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 157.

Laurence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 14.

M.Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 99.

Muh. Thezar dan St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan". *Jurnal Alauddin Law Development*. Vol. 2, No. 3, 03 November 2020. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Muhammad Tahrir Azhary, "Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam", (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 9.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 41.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.7

Muladi dan Barda Nawawi.1998.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Ninik Alfiah. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19". *Jurnal Education and Development*. Vol. 9, No. 2, Mei 2021

Nur Mauliddar, Mohd. Din dan Yanis Rinaldi. 2017. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Pelaporan Penerimaan Gratifikasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No.1, April 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Oheo K. Haris, *Op. Cit.*, hlm. 251-252

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 178.
P. A. F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 5.

Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia", *PUBLIKa*, Volume 3 Nomor 1, 2017, hlm 81

R. Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 5
Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*(Jakarta:Kompas, 2010), hlm.15,

Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji. 2021. "Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Serina*. Vol. 1, No. 1. Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm.16.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

United nations Convention against corruption (UNCAC) pasal 37 ayat 2 dan 3 hal 27.

Vidya Prahassacitta. “Antara Pelanggaran Pidana Dengan Pelanggaran Kode Etik Advokat”, <http://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-denganpelanggaran-kode-etik-advokat/> Diakses 3 Maret 2019.

W.M. Herry Susilowati, “Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *UNPAR Journal Research Report-Humanities and Social Science* Jilid 2 Vol. 2 Tahun 2012, hlm. ii.

Yasmirah Mandasari Saragih. 2017. “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Uundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 5, No. 5, Oktober 2017. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.

